



**KUMPULAN ABSTRAK E-BOOK**

**KOLEKSI E-DEPOSIT**

**PERPUSTAKAAN**

**NASIONAL**

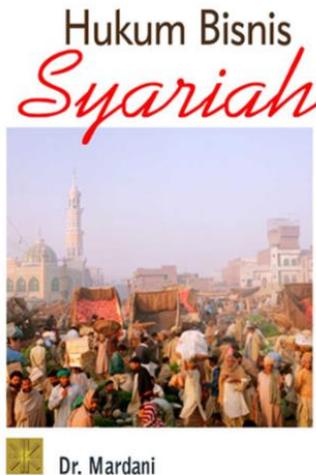
*TEMA HUKUM*  
*2020*



PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

**Penyusun: Lestari Endah Pratiwi**  
**Penyunting: Agus Wahyudi**

**Judul** : Hukum Bisnis Syariah  
**Penerbit** : Kencana  
**Tahun** : 2014  
**Penulis** : Mardani  
**Sumber** : Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 (DEP1910003723)

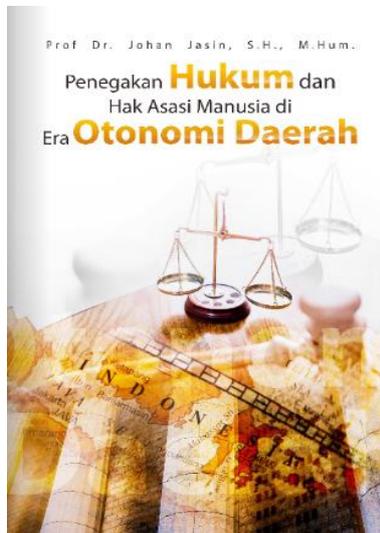


Aktivitas bisnis secara umum berdasarkan fikih keuangan lazim disebut dengan istilah *tijarah* (perdagangan atau *perniagaan*). Dalam bisnis syariah, bentuk aktivitas bisnisnya tidak dibatasi pada jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya berdasarkan tata aturan halal dan haram. Buku ini membahas berbagai perspektif hukum bisnis syariah, yang berkaitan dengan jual-beli, perdagangan dan *perniagaan* di Indonesia, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN, dan peraturan yang

berkaitan dengan operasional bisnis syariah di Indonesia serta doktrin fikih. Antara Lain membahas: tinjauan umum hukum bisnis syariah; bekerja dan berbisnis dalam pandangan Islam; hak, kepemilikan, dan harta dalam pandangan Islam; kerja sama dalam bisnis syariah serta perusahaan dengan prinsip syariah.

**Kata kunci** : *hukum bisnis Syariah, tijarah, perdagangan, perniagaan, hukum Islam*

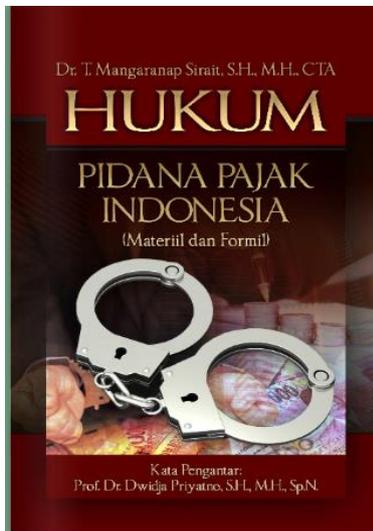
**Judul** : Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah  
**Penerbit** : Deepublish  
**Tahun** : 2019  
**Penulis** : Johan Jasin  
**Sumber** : Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 (DEP1910003686)



Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat tiga persoalan yang sangat mendasar, yakni hukum, hak asasi manusia (HAM); dan otonomi daerah. Bagi bangsa dan bernegara persoalan hukum teramat penting, karena hukum menjadi instrumen utama sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan bahkan hukum bagi masyarakat juga merupakan landasan dasar yang menjadi pegangan tatkala warga masyarakat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dimaksud terkait erat dengan HAM yang harus dilindungi, dijamin dan ditegakkan oleh semua lapisan komponen bangsa. HAM tersebut menjadi unsur penting bagi suatu negara hukum, disamping pemerintah dan yang diperintah tunduk pada hukum serta adanya peradilan administrasi negara. Persoalan penegakan hukum dan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi sesungguhnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Kata kunci** : *penegakan hukum, HAM, otonomi daerah*

**Judul** : Hukum Pidana Pajak Indonesia (Materiil dan Formil)  
**Penerbit** : Deepublish  
**Tahun** : 2019  
**Penulis** : T. Mangaranap Sirait  
**Sumber** : Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 (DEP1910003577)

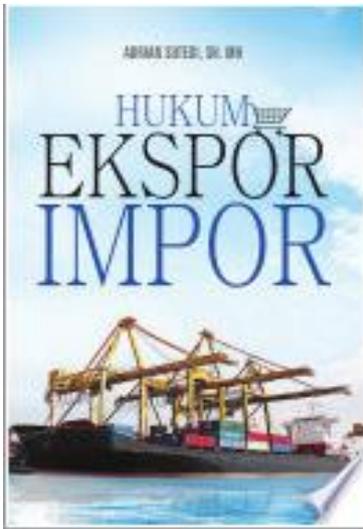


Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau korporasi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karena pajak bersifat wajib dan memaksa, maka Dirjen Pajak juga menjalankan penegakan hukum pidana Materiil pajak secara tegas melalui UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12 Tahun 1994 tentang PBB, dan UU No. I5 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan diselaraskan dengan KUHAP, sehingga tercipta kepatuhan Wajib Pajak Korporasi maupun Orang Pribadi terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Kata kunci** : *hukum pidana pajak, wajib pajak*

**Judul** : Hukum Ekspor Impor  
**Penerbit** : PT. Penebar Swadaya  
**Tahun** : 2014  
**Penulis** : Adrian Sutedi  
**Sumber** : Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 (DEP1910003364)



Perdagangan internasional pada hakikatnya transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang berdomisili di negara-negara yang berbeda. Namun, dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut ataupun darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks karena perbedaan aturan hukum dan cara pembayaran (mata uang). Oleh karena itu, penting dipahami aspek hukum ekspor impor. Salah satu permasalahan dalam peningkatan investasi dan kinerja ekspor Indonesia adalah rendahnya kepastian hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang baik, lengkap, dan dilaksanakan secara konsekuen. Lahirnya Undang-Undang No.2 Tahun 2009 tentang terbentuknya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, menegaskan fungsi lembaga ini sebagai agen pemerintah dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, baik domestik maupun internasional.

**Kata kunci** : *hukum ekspor impor, UU No.2 tahun 2009*

**Judul** : Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat

**Penerbit** : Kencana

**Tahun** : 2018

**Penulis** : Jonaedi Efendi

**Sumber** : Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 (DEP1910003349)



Kajian dalam buku ini berangkat dari sebuah fenomena ketidakadilan yang semakin masif. Peradilan—mulai tingkat pertama hingga kasasi—sebagai institusi untuk mewujudkan keadilan, ‘mati suri’ dengan mengeluarkan putusan-putusan yang tidak adil. Adagium putusan hakim tidak adil, adalah sebuah stigma yang menggejala dalam proses respons masyarakat. Adil kian absurd di saat peradilan meniadakan eksistensinya menjadi lebih buram dan abu-abu. Studi tentang putusan, khususnya putusan kasasi melibatkan seluruh dari tiga lapisan ilmu hukum yakni filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum. Setiap dari lapisan ini memberikan karakteristik analisisnya masing-masing. Hanya saja, nuansa filsafat hukumnya lebih kental dan mewarnai. Filsafat hukum sebagai metateori dari teori hukum dan mewarnai dogmatik hukum.

**Kata kunci** : *hukum, hakim, ketidakadilan, peradilan*